

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- . 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinata Media.
- . 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers:Depok
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- . 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Kencana. Jakarta.
- Abdi Yuhana,2013. *Sistim Ketatanegaraan Indonesia pasca Perubahan UUD 1945*, Fokus Media, Bandung.
- Affan Gaffar,2000. *Politik Indonesia Transmisi menuju Demokrasi*, Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arifin, Firmansyah dkk, 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi

- Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 2003. *Toeri dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Brewer Cairas dalam Efik Yusdiansyah 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung: Bandung.
- Entol Zaenal Muttaqin, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Serang.
- Fajlurrahman Jurdi dan Wiwin Suwandi, 2019, *Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial*, Litera, Yogyakarta.
- , 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- , 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta. 2019
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.
- Ganewati Wuryandari (dkk), 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Green Mind Community, 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media: Yogyakarta.
- HRT. Sri Soemantri, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- H. Dahlan Thaib (dkk), 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Isharyanto, 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik*

- Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Jhon J. Wuest dalam Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi hingga Reformasi*, Grafari Budi Utami., Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ikhtiar Baru Van Hoenave:Jakarta.
- , 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. Ke-2, Konstitusi Press: Jakarta
- , 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Buana Ilmu Populer: Jakarta.
- , 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press.
- , 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- ,2005.*Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta:Konstitusi Perss, cetakan Pertama.
- John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri,2010. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Graha Ilmu:Yogyakarta
- La Sina, 2015, *Hukum Tata Usaha Negara*, Totalmedia, Yogyakarta.
- Matutu, Dg Mustamin, dkk., 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press:Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Moh Mahfud MD, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. GrafindomPersada: Jakarta

- , 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta: Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI: Jakarta.
- Musenef, 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT. Gunung Agung: Jakarta
- Margarito Kamis, 2014, *Kekuasaan Presiden Indonesia (Sejarah Kekuasaan Presiden sejak Merdeka hingga Reformasi Politik)*, Setara Press, Malang.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pangerang Moenta, 2017. *Permusyawaratan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*, Intelegensia Media: Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group: Jakarta
- , 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romi Librayanto, 2008. *Trias Politica* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP: Makassar.
- Sadu Wasistiono, 2006. *Etin Indrayani dkk, Memahami Asas Tugas pembantuan*, Fokus Media: Bandung
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2018. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sardini, N.H, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2018. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya

- Soerjono Soekanto, 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Soematri, 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, PT Remaja Rosda Karya:Bandung.
- Titik Triwulan,2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Utang Rosidi,2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 2019. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka:Jakarta
- M. Yusuf, 2009. Dewan Perwakilan Daerah, Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Zulkifli Aspan, 2013, Jurnal Hukum “PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)” 10 Oktober.

JURNAL

- A Salman Maggalatung, “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 2, Nomor 2, 2015.
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Peran DPD Dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah, *Audito Comparative Law Jurnal*, Vol. 1, Issue 1, Februari-April 2020, hal.33
- E. Zaenal Muttaqin, *Konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif*, *Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal. 15
- Fajlurrahman Jurdi, “Formasi Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial)”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, Nomor 2, 2017.

- Harry Setya Nugraha, Eksistensi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, *RIO Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Februari-Juli 2021, Hal. 73
- Josef Mario Monterio, “Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 39, Nomor 2 Agustus 2017.
- Lenny Sipangkar, Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (*Strengthening the Legislative Function of Regional Representative Council*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 3, ISSN 2579-552, Jakarta, 2016.
- Nanang Samodra KA, Juni 2017, Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ketatanegaraan*, ISSN 2548-4389 (Online) Vol 3.
- P Purwoko, “Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro, Vol 1. Nomor 2 September 2013.
- Putri Uswatun dan A Triyono, “Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk (Analisis Framing Berita Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Jk di Media Online Tempo.co edisi 06 Mei-13 Agustus 2015)”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Rommy Patra, *Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4 No. 1, ISSN 2442-9899, Makassar, 2018.
- Ryan Muthiara Wasti, Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47 Nomor 4, Oktober-Desember, 2017
- Rifki Asrof (dkk), “KH. Abdurrahman Wahid, Kepemimpinan, dan Politik”, *Artikel*, 5 Juli 2019.

- Rina Martina, "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik*, 2010.
- Rosdalina Bukido, "Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah As-Syari'ah*, Vol 10, Nomor 1, 2012.
- Sukri Tamma dan Sakinah Nadir, "Koalisi Politik Di Indonesia Pasca Soeharto", *Jurnal Review Politik*, Vol 3, Nomor 2 Desember 2013.
- Wahyu Gunawan, "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurist-Diction*, Universitas Arlangga, Vol. 1 Nomor 1 September 2018.
- Wayu Eko Yudiatmaja, "Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, Nomor 1, 2015.
- Yusuf Wibisono, "Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 40, Nomor 55, 2017.
- Zulkarnain, "Ketanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan", *Jurnal Sejarah Ketatanegaraan*, Vol 1, Nomor 1, 2014.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562
M A K A S S A ' R 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410 / 1384.1 / SET. DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. M. JABIR, M. Si**
Pangkat/Gol. : **Pembina Utama Muda, IV/c**
Jabatan : **Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.**
Unit Kerja : **Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**
Instansi : **Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Abd. Rahim. M**
NIM : **B012212033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin Makassar**

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai tugas akhir studi Strata Dua di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 26 April sampai dengan 19 Juni 2023 dengan judul penelitian "Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Sistem Otonomi Daerah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipersyaratkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL

Drs. M. JABIR, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19661031 198709 1001